

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

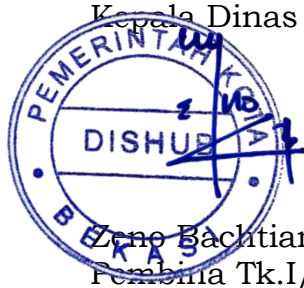
Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Menyusun Rencana Kerja (RENJA) perubahan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini memuat program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini Kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Bekasi,
Kepala Dinas Perhubungan



Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si.M,T
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19730211 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan pengaruh globalisasi serta implikasi meningkatnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat. Dengan demikian menuntut perubahan paradigma dan pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Begitu pula halnya dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang tidak terlepas dari tuntutan publik tersebut. Sebagai Dinas yang berada pada posisi dengan pertumbuhan cepat dan strategis, Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu Dinas Perhubungan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi dititikberatkan pada pelayanan publik dalam bidang transportasi jalan, yang merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, mendorong pertumbuhan kota melalui kegiatan jasa dan perdagangan. Pentingnya transportasi jalan ini tercermin pada semakin meningkatkan kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di Kota Bekasi.

Secara umum Dinas Perhubungan telah melaksanakan fungsi di atas, yaitu sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dan juga

Pemerintah Kota Bekasi yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis di antara Dinas, Pemerintah, dan masyarakat Kota Bekasi. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik dari masyarakat maupun Pemerintah Kota Bekasi. Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada pencapaian sasaran yang telah dicapai tiap tahunnya. Dalam melaksanakan kegiatan dan pengukuran kinerja kegiatan telah diidentifikasi secara lengkap dari input, output, dan outcome. Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi tentang sejauh mana tingkat kepuasan yang diterima oleh masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sebagai penutup, semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini bermanfaat bagi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang semakin baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... v

BAB PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 3

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU 7

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan..... 7

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan..... 45

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 52

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 55

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 66

BAB TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN 86

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 86

 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan 89

 3.3 Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan 91

BAB RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN..... 100

BAB PENUTUP 110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Bekasi.....	22
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.....	50
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bekasi	56
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari MUSRENBANG Tahun 2025.....	67
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	67
Tabel 3.1	Tujuan,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025.....	90
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Bekasi.....	92
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.....	102

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan terget kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya.

Proses penyusunan Renja Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal (Ranwal) Renja, penyusunan rancangan Renja, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Sejak proses penyusunan rancangan awal Renja, kebijakan yang ada di dalamnya berpedoman pada beberapa dokumen perencanaan di atasnya yaitu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi (RKPD Provinsi), RKP dan RPJMN.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang substansial merupakan penerjemah dan penjabaran dari visi, misi dan program Pembangunan tahunan daerah;
2. Renja merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja perangkat daerah, sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga akhir tahun;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

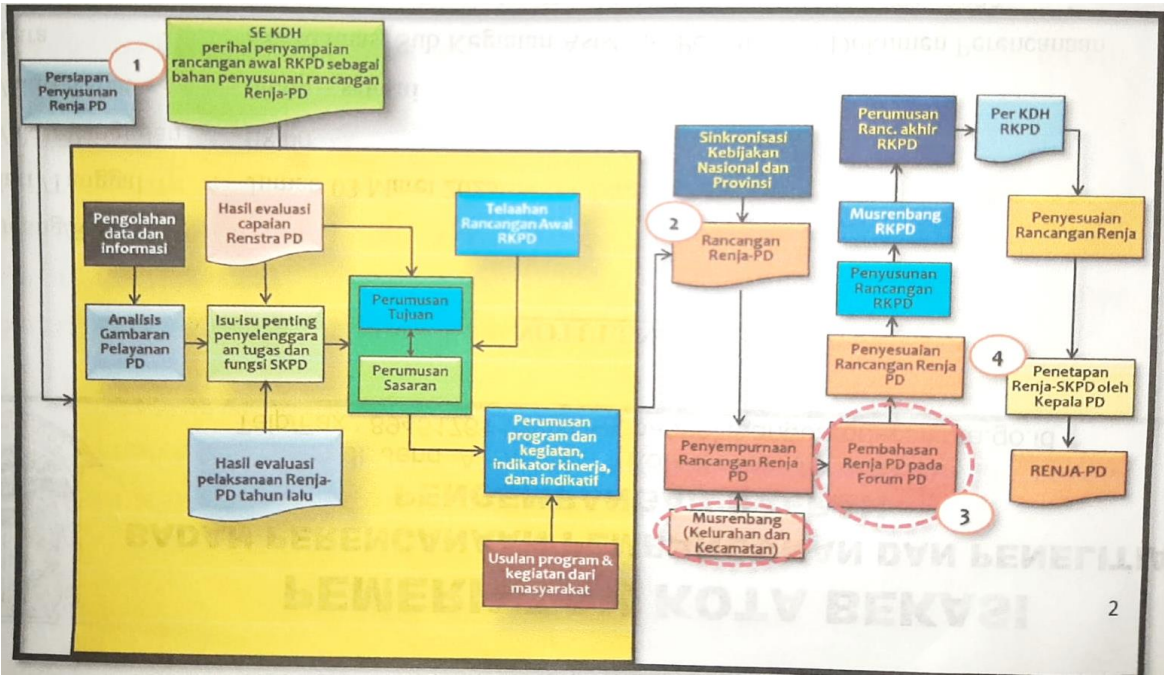
3. Renja merupakan acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan Perhubungan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk periode tahun 2025 memuat program/kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2025, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tema Pembangunan daerah pada RKPD Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah “**Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Keluarga yang Inklusif dan Merata**”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi;
- 14. Instruksi Mentri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Perangkat Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 Dan Daerah Otonom Baru;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
- 19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Bekasi;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui gambaran umum tentang pembangunan Kota Bekasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025.
- Mengetahui kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025.
- Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 memiliki sistematika penulisan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Bab II Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan perkiraan Capaian Tahun berjalan 2024 serta kaitannya dengan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Di samping itu, pada Bab II diuraikan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV Menjelaskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Bab V Memuat kesimpulan dari rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan rekomendasi rencana tindak lanjut dari permasalahan yang ada.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

BAB

2

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi perhubungan kepada masyarakat Kota Bekasi. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi dan penataan pelayanan yang memadai dari tahun ke tahun walaupun anggaran yang ada sangat terbatas namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Perhubungan, Renja juga merupakan redaksional alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan , keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Secara umum indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja tahunan adalah input,

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

output dan *outcome* sementara *benefit* dan *impact* lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumberdaya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2023 berdasarkan LKIP 2023 yang telah disusun menetapkan tiga sasaran strategis, tiga indikator kinerja, dua program, 15 kegiatan dan tiga puluh sub kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2023 secara umum dapat dicapai dengan cukup baik, Sampai akhir Desember 2023 pencapaian realisasi fisik sebesar 98% dan realisasi keuangan 93.83%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas

Indikator Sasaran : Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani

Sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Kota Bekasi mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat perdagangan, industri dan tempat tinggal serta adanya pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pembangunan LRT/Light Rail Transit, pembangunan proyek SPAM Regional Jatiluhur 1 dan Pembangunan DDT/Double-Double Track lintasan kereta api, proyek pemasangan pipa pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jalan Hasibuan Kecamatan Bekasi dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kondisi transportasi dan lalu lintas di Kota Bekasi. Kemacetan lalu lintas

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

masih menjadi isu strategis yang dipengaruhi oleh tingkat pelayanan jaringan jalan (Level of Service/LOS) cukup rendah masih terdapat 24 titik kemacetan prioritas yang menjadi target penanganan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023.

Indikator ini mendukung keberhasilan dalam pencapaian titik kemacetan yang teratasi yang termasuk dalam Misi Kedua Kota Bekasi yaitu “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai” sejalan dengan Tujuan Kota Bekasi “Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum Kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel”

Penanganan kemacetan merupakan salah satu program dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang transportasi dan lalu lintas angkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sebagai pelaksanaan dari Perpres tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 551.1/944-Setda.TU Tentang Penataan Ijin Trayek, Titik Kemacetan, Penempatan Petugas Lalu Lintas di Kota Bekasi.

Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 terdapat 24 titik/simpang kemacetan yang menjadi target penanganan dalam 5 (lima) tahun, untuk Tahun 2023 Target penanganan kemacetan sebanyak 6 titik/simpang yaitu : Simpang Tol Timur Jatimulya, Simpang Stasiun Kranji, Simpang Sumir Jalan Hankam, Simpang Gamprit Pondok Gede, Simpang Sawo, Simpang Jatibening.

Dari Indikator Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani tahun 2023 sebesar 80 persen, sementara realisasi mencapai 80 persen maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani sebesar 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 sudah tercapai. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah Titik Kemacetan yang tertangani di Kota Bekasi pada Tahun 2023 dibagi Jumlah target penanganan titik kemacetan di Kota Bekasi pada Tahun 2023 dikali 100%.

Untuk melihat perbandingan capaian persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani Tahun 2022 dan 2023 (lihat pada gambar 2.1)

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



Gambar 2.1 Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani
(Sumber LKIP Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2023)

Data capaian Tahun 2023 ini diperoleh dari lokasi yang menjadi target penanganan kemacetan sebanyak 6 titik/simpang yaitu : Simpang Tol Timur Jatimulya, Simpang Stasiun Kranji, Simpang Sumir Jalan Hankam, Simpang Gamprit Pondok Gede, Simpang Sawo, Simpang Jatibening.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan penanganan titik kemacetan pada 6 titik sesuai dengan target yang telah ditetapkan berupa pemasangan rambu lalu lintas, perbaikan APILL, dan penambahan petugas pengatur lalu lintas.

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator dan Target Sasaran : Sasaran Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan transportasi dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan transportasi diakhiri. Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur-unsur transportasi meliputi: (a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya, (c) ada jalanan yang dapat dilalui, (d) ada terminal asal dan terminal tujuan, (e) sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. Moda transportasi darat kemudian lebih dikenal dengan istilah Lalu Lintas Angkutan Jalan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ,

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Sarana dan Prasarana lalu lintas merupakan ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Dalam hal untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas maka diperlukannya pengawasan kelaikan jalan terhadap sarana dan prasarana. Sehingga sarana dan prasarana yang tersedia adalah sarana prasarana perhubungan yang laik fungsi demi menjamin keselamatan pengguna jalan di Kota Bekasi.

Terminal sebagai lokasi asal dan tujuan perjalanan memainkan peranan penting untuk pengaturan kendaraan umum. Luasan terminal yang memadai untuk keperluan sirkulasi, parkir, kedatangan dan fasilitas operasional baik utama maupun pendukung menjadi hal yang sangat yang diperlukan. Untuk melayani naik turunnya penumpang dan perpindahan intra dan / atau moda transportasi, Kota Bekasi saat ini memiliki 1 buah terminal induk dan 2 sub terminal. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan (terminal, halte dan rambu) dikali 100%.

Untuk melihat perbandingan capaian persentase peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi Tahun 2022 dan 2023 Tahun 2022 dan 2023 (lihat pada gambar 2.2)

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



Gambar 2.2 Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi
(Sumber LKIP Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2023)

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Indikator dan Target Sasaran : Nilai Evaluasi AKIP

Nilai evaluasi AKIP merupakan salah satu indikator untuk mencapai Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Pada Tahun 2023 indikator Nilai Evaluasi AKIP sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 Dinas Perhubungan Kota Bekasi ditetapkan Nilai ‘A’ dengan nilai minimal 80,00 sementara realisasi hasil Nilai Evaluasi AKIP 78,41 atau dengan Nilai “BB” dengan demikian capaian pada indikator ini sebesar 98 persen.

Target tahun 2023 dari Indikator Nilai Evaluasi AKIP tahun 2023 senilai ‘A’ dengan realisasi senilai ‘BB’ maka capaian kinerja tahun 2022 atas indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP sebesar 98 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2023 belum tercapai.

Untuk melihat perbandingan capaian persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai Evaluasi AKIP antara Tahun 2022 dengan 2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai Evaluasi AKIP	
		2023	2023
Target	Nilai	A	A
Realisasi	Nilai	BB	BB

(Sumber LKIP Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2023)

Capaian Kinerja Pendapatan pada Tahun 2023 pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Capaian Kinerja pendapatan tahun 2023 terhadap Renstra Tahun 2018 –2023 sebagai berikut :

DATA REALISASI PENDAPATAN ANGGARAN DAERAH (PAD) TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI

NO	JENIS RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	JUMLAH	SAMPAI DENGAN MINGGU INI	%	SISA TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	RETRIBUSI JENIS UMUM		6.561.622.500	2.264.000	33.901.800	7.105.078.900	108,28	(543.456.400)
1.	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		5.199.022.500	-	25.274.800	5.639.414.900	108,47	(440.392.400)
		- MOBIL PENUMPANG / M	7.500.000	-	-	12.395.000	165,27	(4.895.000)
		- MOBIL BUS	190.000.000	-	2.334.400	228.547.300	120,29	(38.547.300)
		- MOBIL BARANHG	5.001.522.500	-	22.940.400	5.398.472.600	107,94	(396.950.100)
2.	PENYEDIAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		1.362.600.000	2.264.000	8.627.000	1.465.664.000	107,56	(103.064.000)
		MEDAN SATRIA	51.100.000	-	435.000,00	51.050.000,00	99,90	50.000
		- MOTOR		-	300.000,00	30.300.000		
		- MOBIL		-	135.000,00	17.000.000		
		- TRUK		-	-	3.750.000		
		BEKASI UTARA	71.679.000	210.000,00	500.000,00	59.700.000,00	83,29	11.979.000
		- MOTOR		120.000	300.000,00	43.200.000		
		- MOBIL		90.000	200.000,00	16.500.000		
		- TRUK		-	-	-		
		PONDOK GEDE	79.274.000	73.000,00	511.000,00	57.722.000,00	72,81	21.552.000
		- MOTOR		33.000	231.000,00	25.752.000		
		- MOBIL		40.000	280.000,00	31.970.000		
		- TRUK		-	-	-		
		BEKASI SELATAN	210.591.000	-	125.000,00	52.983.000,00	70,76	61.580.000
		- MOTOR		-	30.000,00	39.243.000		
		- MOBIL		-	95.000,00	13.740.000		

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	JENIS RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	JUMLAH	SAMPAI DENGAN MINGGU INI	%	SISA TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- TRUK		-	-	-		
		SNK			-	549.629.000,00		
		- MOTOR			-	218.694.000		
		- MOBIL			-	330.935.000		
		- TRUK			-	-		
		PTMP		795.000	1.585.000,00	96.028.000,00		
		- MOTOR		600.000	1.200.000,00	69.768.000		
		- MOBIL		195.000	385.000,00	26.260.000		
		- TRUK			-	-		
		RAWALUMBU	86.491.000	-	445.000,00	61.128.000,00	70,68	25.363.000
		- MOTOR		-	270.000,00	42.168.000		
		- MOBIL		-	175.000,00	18.960.000		
		- TRUK		-	-	-		
		BEKASI TIMUR	338.347.000	-	580.000,00	99.580.000,00	65,96	115.167.000
		- MOTOR		-	-	14.940.000		
		- MOBIL		-	580.000,00	84.640.000		
		- TRUK		-	-	-		
		PTMP		-	1.037.000,00	123.600.000,00		
		- MOTOR			12.000,00	37.455.000		
		- MOBIL			1.025.000,00	86.145.000		
		- TRUK			-	-		
		BEKASI BARAT	171.536.000	170.000,00	562.000,00	118.497.000,00	69,08	53.039.000
		- MOTOR		120.000	462.000,00	57.777.000		
		- MOBIL		50.000	100.000,00	49.470.000		
		- TRUK		-	-	11.250.000		
		MUSTIKA JAYA	65.769.000	-	420.000,00	44.914.000,00	68,29	20.855.000
		- MOTOR		-	255.000,00	26.844.000		
		- MOBIL		-	165.000,00	18.070.000		
		- TRUK		-	-	-		
		PONDOK MELATI	46.424.000	120.000,00	280.000,00	26.450.000,00	56,97	19.974.000
		- MOTOR		60.000	120.000,00	11.580.000		
		- MOBIL		60.000	160.000,00	14.870.000		
		- TRUK		-	-	-		
		JATI ASIH	137.591.000	110.000,00	647.000,00	74.034.000,00	53,81	63.557.000
		- MOTOR		-	132.000,00	23.394.000		
		- MOBIL		80.000	380.000,00	35.640.000		
		- TRUK		30.000	135.000,00	15.000.000		
		JATI SAMPURNA	61.024.000	606.000,00	1.140.000,00	29.945.000,00	49,07	31.079.000
		- MOTOR		426.000	840.000,00	18.900.000		
		- MOBIL		180.000	300.000,00	11.045.000		

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	JENIS RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	JUMLAH	SAMPAI DENGAN MINGGU INI	%	SISA TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- TRUK		-	-	-		
		BANTAR GEBANG	42.774.000	180.000,00	360.000,00	20.404.000,00	47,70	22.370.000
		- MOTOR		60.000	90.000,00	9.504.000		
		- MOBIL		120.000	270.000,00	10.900.000		
		- TRUK		-	-	-		
II	RETRIBUSI JENIS USAHA		1.594.521.400	-	20.671.000	1.418.288.975	88,95	176.232.425
1.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		140.602.400	-	1.060.000,00	141.804.000,00	100,85	(1.201.600)
	MCK TERMINAL	- TERMINAL INDUK (BKS)	130.000.000	-	1.060.000,00	131.100.000	100,85	
		- TERMINAL KAYURINGIN	10.602.400	-	-	10.704.000	100,96	
3	TERMINAL		1.103.919.000	-	19.611.000	1.084.757.000	98,26	19.162.000
		1 INDUK (BEKASI)	657.995.000	-	5.641.000,00	662.165.000,00	100,63	(4.170.000)
		- ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)		-	1.530.000,00	190.560.000		
		- ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)		-	156.000,00	19.860.000		
		- BUS KOTA PATAS AC		-	132.000,00	18.252.000		
		- BUS KOTA EKONOMI		-	96.000,00	11.913.000		
		- ELF		-	258.000,00	32.824.000		
		- TEMPAT USAHA		-	246.000,00	34.750.000		
		- PARKIR INAP		-	915.000,00	133.200.000		
		- ANGKOT		-	1.052.000,00	132.248.000		
		- BUS PPD/TRANSJSKARTA		-	-	19.984.000		
		- AKAP JOYOMARTONO		-	800.000,00	48.290.000		
		- BUS KOTA JR CONNEXION		-	456.000,00	5.284.000		
		- DAMRI				15.000.000		
		2 PONDOKGEDE	165.380.000	-	2.692.000,00	150.120.000,00	90,77	15.260.000
		- ANGKOT		-	1.400.000,00	136.740.000		
		- BUS AKAP PPD/ JR CONNEXTION		-	1.292.000,00	13.380.000		
		3 KAYURINGIN	280.544.000	-	11.278.000,00	272.472.000,00	97,12	8.072.000
		- ANGKOT		-	160.000,00	89.310.000		
		- BUS AKAP/DAMRI		-	9.420.000,00	118.170.000		
		- TEMPAT USAHA		-	216.000,00	19.380.000		
		- PARKIR INAP		-	60.000,00	4.950.000		
		- TRANS JAKARTA		-	-	-		
		- DAMRI		-	1.064.000,00	11.816.000		
		- M. PNP PRIBADI (PU)		-	358.000,00	28.846.000		
2.	PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA		350.000.000	-	-	191.727.975,00	54,78	158.272.025
	PSU	- TERMINAL INDUK (BKS)	275.000.000	-	-	94.727.275	34,45	
		- TERMINAL KAYURINGIN	75.000.000	-	-	97.000.700	129,33	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	JENIS RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	JUMLAH	SAMPAI DENGAN MINGGU INI	%	SISA TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU		36.750.000	-	-	6.120.100	16,65	30.629.900
1.	IJIN TRAYEK		36.750.000	-	-	6.120.100	16,65	30.629.900
	- DPMTSP	- LINTAS DALAM KOTA (LOKAL)	26.000.000	-	-	1.598.300		
	- DISHUB	- LINTAS DAERAH	10.750.000	-	-	4.521.800		
JUMLAH KESELURUHAN :			8.192.893.900	2.264.000	54.572.800	8.529.487.975	104,11	(336.594.075)

(Sumber Laporan PAD Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut secara keseluruhan capaian pemungutan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan target yang harus dicapai sebesar Rp. 8.192.893.900,- dan realisasi yang dicapai Dinas Perhubungan sebesar Rp. 8.529.487.975 ,- yaitu 104.11%.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

2.1.2 Perkiraan Pencapaian Kinerja tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama periode RENSTRA 2024 – 2026 dan merupakan periode menilai keberhasilan kinerja SKPD dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Berbagai indikator pelayanan SKPD yang telah ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolok ukur pencapaian fungsi pelayanan SKPD.

Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progres pelaksanaan sampai berakhirnya tahun anggaran.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Renstra 2024 – 2026 menetapkan tiga sasaran strategis, tiga indikator kinerja, dua program, lima belas kegiatan dan tiga puluh tujuh sub kegiatan. Dalam Renja tahun 2024 menetapkan tiga sasaran strategis, 3 indikator kinerja, dua program , empat belas kegiatan dan tiga puluh empat sub kegiatan.

Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 sesuai dengan penetapan kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas

Indikator 1: Persentase Peningkatan Titik Kemacetan yang Tertangani sebesar 80 %.

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	92%
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	12%
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 Dokumen
2	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	12 Unit
3	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	298 Unit

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	99 Unit
6	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan
7	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	227 Dokumen
8	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan
10	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator 2 : **Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Perhubungan yang laik fungsi**

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
1	3	2	4
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal	72%
		Persentase Peningkatan Fasilitas Prasaranan Penunjang Transportasi	70%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
1	3	2	4
		Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	68.000 Kendaraan
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembang	202 Unit
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7 Unit
4	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	45000 Unit
5	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	19 Unit
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 Unit

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Indikator : Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
		Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.506 Orang/Bulan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	1 Paket
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	- Paket
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Dokumen
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target pencapaian yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat mencapai target kinerja sebesar seratus persen.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	1	201	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	1 Laporan	100 %
2	15	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	15	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5832 Orang Bulan	1944 Orang Bulan	1944 Orang Bulan	1944 Orang Bulan	100%	1944 Orang Bulan	1944 Orang Bulan	100 %

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 laporan	100 %
2	15	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	67 %
2	15	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	-	1 Paket	100 %

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100%	46 Orang	18 Orang	34.6%
2	15	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	15	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	100 %
2	15	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100 %
2	15	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100 %
2	15	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2Dokumen	100 %
2	15	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12Laporan	100 %
2	15	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100 %
2	15	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	209	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100 %
2	15	1	209	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	324 Unit	119.00 Unit	119.00 Unit	119.00 Unit	100%	86 Unit	119 Unit	100 %

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2unit	100 %
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	93%	85%	91%	91%	100%	91,70%		0%
						Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	14%	2,26	10,60%	10,60%	100%	11,70%		0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	71.000 Kendaraan	72.18%	78%	79,24%	101,59 %	85%		0%
						Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	80%	39.50%	60%	72,50%	120,83 %	70%		0%
						Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	80#	40%	60%	60%	100%	100%		0%
2	15	2	201		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penurunan permasalahan lalu lintas	100%	-	-	-	-	100%		0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	201	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	36Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0 Laporan	0%
2	15	2	202		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase peningkatan tingkat keselamatan jalan	100%	-	-	-	-	100%		0%
2	15	2	202	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	45 Unit	15 Unit	15 unit	15 unit	100%	15 Unit	0 Unit	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	202	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	65 Unit	20 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	20 Unit	0 Unit	0%
2	15	2	202	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20 Unit	6 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	6 Unit	0 Unit	0%
2	15	2	203		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	persentase peningkatan pelayanan dibidang angkutan	100%	-	100%	-	-			0%
2	15	2	203	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	0 Unit	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	204		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase peningkatan Pelayanan Perparkiran	100%	-	100%	-	-	100%	-	0%
2	15	2	204	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 laporan	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor	100%	-	-	-	-	100%		0%
2	15	2	205	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	15Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	7 Unit	0 Unit	0%
2	15	2	205	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	45.000 Unit	40.000 Unit	45.000 Unit	45.000 Unit	100%	45.000 Unit	0 Unit	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	205	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	15	2	205	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	0 Unit	0%
2	15	2	206		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan ketertiban kelancaran keamanan dan keselamatan lalu lintas	100%	-	-	-	-	100%		0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	206	1		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Lapr	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 laporan	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	206	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	0 Unit	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	206	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 laporan	0%
2	15	2	208		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	208	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	1 Laporan	0 Laporan	0%
2	15	2	209		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan dibidang angkutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	209	5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	27 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	0 Unit	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	209	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	0 Laporan	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	210		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan dibidang angkutan	100%	-	-	-	-	100%	-	0%
2	15	2	210	1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	0 Laporan	0%

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) indikator program dimana capaian indicator program terealisasi dengan baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi diarahkan untuk mendukung serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bekasi.

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kota Bekasi terdapat 4 jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi : (1) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan, (2) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Sungai dan Danau, (3)Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Penyeberangan, dan (4) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Laut. Dari keempat jenis pelayanan dasar tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi baru dapat melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan pada poin pertama.

Adapun capaian indikator pelayanan dasar angkutan jalan berdasarkan Permenhub tersebut diatas oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2022 dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Indikator SPM : “Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten”, dengan target SPM 75%.

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah jaringan jalan kota yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten”.

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan penanganan serius. Angkutan umum merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang,

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

jasa, tenaga kerja dan merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Berbagai bentuk moda angkutan umum diupayakan memiliki karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada publik sehingga dapat mewarnai perkembangan system angkutan umum yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan agar dapat bersaing dengan angkutan pribadi.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 maka Capaian Kinerja Pelayanan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan mencapai 100% dimana jumlah jaringan jalan diKota Bekasi yang telah terlayani oleh angkutan umum.

Tersedianya Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

- Indikator SPM “Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek”, dengan target SPM 100%.

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten”. Halte merupakan tempat kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Jumlah halte di kota Bekasi sudah tersedia untuk pelayanan angkutan umum. Capaian Kinerja ketersediaan haltedalam jaringan trayek kabupaten yang dilayani oleh angkutan umum sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%

- Indikator SPM “Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek”, dengan target SPM (40%)

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan”.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Pada Kota Bekasi terdapat 2 jenis terminal, yaitu : (1) Terminal type B (yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan) dan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

(2) Terminal type C (yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan). Jumlah terminal terminal type C sebanyak 2 unit (Terminal Bekasi dan Terminal Kayuringin) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Fungsi masing – masing terminal tesebut adalah :

- Terminal Bekasi untuk melayani jaringan AKAP, AKDP dan jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Kota Bekasi.
- Terminal Kayuringin untuk melayani jaringan AKDP (Bekasi – Jakarta) dan jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Bekasi bagian Barat.
- Terminal Pondok Gede untuk melayani jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Bekasi bagian Barat.
- Terminal Taman Harapan Baru untuk melayani jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Bekasi bagian Utara.

Sampai dengan tahun 2022 Capaian Kinerja Pelayanan ketersediaan terminal angkutan penumpang sebesar 100 %.

b. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan

- Indikator SPM “Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota”, dengan target SPM 60%

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah tersedianyafasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan peneranganjalan umum (PJU) pada jalan kabupaten disertai penetapan kebijakanberupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan,petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten/Kota”.

Sesuai dengan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 mewajibkan jalan untuk dilengkapi dengan rambu, marka dan alat pemberi isyarat, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalanserta fasilitas pendukung lainnya. Sarana perlengkapan jalan tersebut dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 maka Capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2022 sudah mencapai 100% dari target SPM Perhubungan sebesar

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

60%. Capaian ini tidak memperhitungkan jumlah PJU yang terpasang di Kota Bekasi karena kewenangan pengelolaan PJU berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

c. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

- Indikator SPM “Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagiKabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000(empat ribu) kendaraan wajib uji”, dengan target SPM 60%.

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah kendaraan bermotor wajib uji pada kabupaten terhadap 4.000 unit kendaraan bermotor wajib uji dalam kabupaten”.

Keterangan : yang dimaksud dengan SPM unit pengujian kendaraan bermotor adalah seperangkat alat uji dasar.

Capaian kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dari jumlah total kendaraan wajib uji diKota Bekasi pada tahun 2022 sebesar 68,197 unit.

Dari jumlah taman kendaraan wajib uji di Kota Bekasi yang ada tersebut telah dilayani oleh 1 unit pengujian kendaraan bermotor, yaitu : Pengujian Kendaraan Bermotor Bulak Kapal dan Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling.

d. Sumber Daya Manusia

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal”, dengan target SPM 50%

Jumlah SDM di bidang terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah terpenuhinya sesuai kebutuhan untuk 4 terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor”, dengan target SPM 100%

Jumlah SDM bidang pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bekasitelah terpenuhinya sesuai kebutuhan untuk pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Capaian kinerja SDM bidang pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota”, dengan target SPM 40%
Jumlah SDM di bidang MRL dan evaluasi Andalalin, pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah memenuhi kebutuhan SDM bidang tersebut. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2022 sebesar 62.5%.
- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum”, dengan target SPM 100%.
Jumlah SDM di bidang pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah memenuhi kebutuhan bidang tersebut. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Bekasi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	
2	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek		40%	40%	40%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan(rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	Fasilitas Perlengkapan Jalan	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	
4	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	
5	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	Sumber Daya Manusia	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang andalalin, pengelolaan parkir pada kab/kota		40%	40%	40%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kab/kota	Keselamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPEDITBANGDA	
KABAG HUKUM	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

- a. Kekuatan
 - 1. Komitmen aparaturnya Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 - 2. Adanya Tugas Pokok dan fungsi yang jelas;
 - 3. Tersedianya sarana kerja yang memadai;
 - 4. Adanya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ dan terminal;
 - 5. Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor dan peralatannya.
- b. Kelemahan
 - 1. Sebaran SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;
 - 2. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan transportasi, kelalulintasan, teknik mesin, serta yang memiliki kemampuan IT diatas rata-rata;
 - 3. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
 - 4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi.
- c. Peluang
 - 1. Tersedianya angkutan umum yang melayani Wilayah Kota Bekasi;
 - 2. Letak geografis Kota Bekasi yang strategis karena sebagai penyangga Ibukota Jakarta;
 - 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
 - 4. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, Provinsi dan *Stakeholder* lainnya;
 - 5. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi.
- d. Tantangan
 - 1. Belum terlaksananya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

2. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat mudahnya memperoleh fasilitas kredit dan menurunnya kualitas, kuantitas sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan kemacetan;
3. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang di indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain;
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola transportasi perkotaan;
5. Adanya potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Dari hasil identifikasi diatas, maka dirumuskan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan di bidang perhubungan adalah :

1. Kemacetan lalu lintas faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya standar pelayanan minimal untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/MRLL, Evaluasi Analisi dampak lalu lintas/andalalin, pengelolaan parkir pada kab/kota, tingkat jaringan jalan (LOS) yang rendah masih terdapat 24 titik kemacetan.
2. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya indikator kinerja utama untuk Persentase pelayanan angkutan yang baik,kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
3. Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

- 4. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
- 5. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- 6. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

2.3.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis pemerintahan tahun 2024 sebagai berikut :

- 1. Kemacetan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhinya tingkat pelayanan jalan (LOS) cukup rendah masih terdapat 24 titik kemacetan, tidak seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian, Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar, peningkatan aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan, kurangnya SDM MRL.
- 2. Belum optimalnya angkutan umum dan massal, faktor yang mempengaruhi fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi, keselamatan transportasi

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai serta belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal. Hal ini juga ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator pada SDGs yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan

Dalam menyikapi isu-isu diatas Dinas Perhubungan Kota Bekasi menempuh beberapa hal diantaranya yaitu meningkatkan kinerja aparatur melalui bimtek/diklat, membangun sarana dan prasarana perhubungan, melakukan penataan fasilitas lalu lintas, meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas serta perparkiran dan dengan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Dishub melalui penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan digitalisasi berdasarkan isu strategis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi perlu dilakukan sinkronisasi dengan rancangan awal rencana kerja pemerintah Kota sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk di ajukan menjadi rencana kerja.

Berikut Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bekasi :

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bekasi

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				55.012.674.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				86.609.577.879	
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	30.000.000			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	73.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	73.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	70.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3.000.000	
			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	26.752.674.000			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	76.993.689.689	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	26.752.674.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	76.990.689.689	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2506 Orang	26.722.674.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2634 Orang/bulan	76.990.689.689	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	650.000.000			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	832.655.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	650.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	832.655.000	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	444.455.000	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	388.200.000	
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	26.450.000.000			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5.823.424.040	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.300.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.972.081.000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.709.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.079.620.000	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	228.000.000	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000	
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Laporan	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	113.870.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000	
15	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1 Dokumen	4.882.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	24.150.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.851.343.040	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	650.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.306.600.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.544.743.040	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.130.000.000			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.886.809.150	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	0%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	902.350.000	
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	700.000.000	
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	202.350.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	1.130.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	1.984.459.150	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	180.000.000	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 Unit	650.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 Unit	1.104.459.150	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	600.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				95.497.358.297	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				107.004.242.640	
			Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	92,50%	54.766.442.932			Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	92,50%	92.539.993.200	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Pelaksanaan Rencana Jaringan Jalan LLAJ di Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	100 %	42.366..442.932	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Pelaksanaan Rencana Jaringan Jalan LLAJ di Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	0 %	0	
24	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 Laporan	42.366..442.932	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Laporan	0	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	100%	12.400.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	100%	92.539.993.200	
25	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	
26	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	65 Unit	6.000.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	65 Unit	13.842.576.900	
27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20 Unit	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20 Unit	200.000.000	
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	45 Unit	6.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	45 Unit	78.297.416.300	
			Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	13%	9.700.000.000			Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	13%	2.993.135.487	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	9.300.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	2.793.135.487	
29	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	500.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	900.000.000	
30	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Kota Bekasi	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	- Unit	-	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Kota Bekasi	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	2 Unit	160.716.800	
31	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Bekasi	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	- Unit	-	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Bekasi	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	177.787.440	
32	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	6 Unit	6.000.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	6 Unit	756.135.247	
33	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2.800.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	798.496.000	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	100%	400.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Bekasi	Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	100%	200.000.000	
34	Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pegemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	400.000.000	Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pegemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	75%	14.704.644.293			Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	75%	7.601.500.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal	100%	14.504.644.293	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal	100%	7.601.500.000	
35	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	14.304.644.293	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	7.401.500.000	
36	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	200.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	200.000.000	
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Pelayanan Angkutan Perkotaan	100%	200.000.000	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Persentase Pelayanan Angkutan Perkotaan	100%	0	
37	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	85%	2.009.722.320			Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	85%	1.743.143.200	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	100%	200.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	100%	750.000.000	
38	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	- Unit	-	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	2 Unit	200.000.000	
39	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	550.000.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Parkir	100%	1.809.722.320	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Bekasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Parkir	100%	993.143.200	
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	809.722.320	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	793.143.200	
41	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1 Laporan	1.000.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1 Laporan	200.000.000	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elektronik		Terintegrasi Secara Elektronik			Elektronik		Terintegrasi Secara Elektronik			
			Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	70.000	14.316.548.752			Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	70.000	2.126.470.753	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Persentase Kendaraan yang laik jalan	100%	14.316.548.752	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Persentase Kendaraan yang laik jalan	100%	2.126.470.753	
42	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	30 Unit	10.520.348.752	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	400.348.753	
43	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	371.200.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	0	
44	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	60.000 Unit	1.752.000.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	60.000 Unit	726.122.000	
45	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 Dokumen	500.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 Dokumen	500.000.000	
46	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan	200.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan	0	
47	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	200.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	0	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	500.000.000	
49	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	200.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0	
50	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	200.000.000	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0	
51	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	200.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0	
	JUMLAH				150.510.032.297	JUMLAH				193.613.820.519	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “*top down & bottom up*”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Bekasi untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD.

Diantaranya ke ikut sertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan Perhubungan telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberi rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukan ke dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan.

Berikut Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Musrenbang dan Pemangku Kepentingan Tahun 2025.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari MUSRENBANG
Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Dibutuhkan lampu PJU untuk mengatasi rawan keamanan	RW 014, Kota Bekasi	175.000.000

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan PJU RT.002-004 RW.018 Villa Mas Kel.Perwira Kec.Bekasi Utara	RT.002-004 RW.018 Villa Mas Kel.Perwira Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi	200.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan PJU RW.005 Kel Pejuang Medan Satria	RW.005 Kel Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi	150.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan PJU RW.022 Perumahan Taman Harapan Baru Kel Pejuang Kec.Medan Satria, 30 titik	RW.022 Perumahan Taman Harapan Baru Kel Pejuang Kec.Medan Satria, Kota Bekasi	180.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum RT.01, 02 RW.031 Kav. Harapan Kel.Pejuang Kec.Medan Satria	RT.01, 02 RW.031 Kav. Harapan Kel.Pejuang Kec.Medan Satria, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Jl. Lingkungan RT 08 RW 01 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kota Bekasi	Jl. Lingkungan RT 08 RW 01 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kota Bekasi , Kota Bekasi	50.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan di RT 08 RW 014 7 Titik Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi	RT 08 RW 014 7 Titik Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi , Kota Bekasi	50.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPETITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan Lampu PJU RT 005 RW 002 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi	RT 005 RW 002 25 Titik Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi , Kota Bekasi	50.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Lampu di RW 011 10 Titik Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi	RW 011 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi , Kota Bekasi	50.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Lampu Penerangan (PJU) 10 Titi RT 010 RW 012 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi	RT 010 RW 012 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan 10 Titik Jl. Lingkungan RT 04 RW 01 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi	Jl. Lingkungan RT 04 RW 01 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi , Kota Bekasi	50.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan (PJU) 20 Titik RT 04 RW 013 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi	RT 04 RW 013 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi , Kota Bekasi	50.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan PJU di jalan Jati Timur RW. 08 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu	jalan Jati Timur RW. 08 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan Lampu PJU Lingkungan RW. 11 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu	RW. 11 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK DI PERUM BEKASI TIMMUR REGENCY BLOK H RT.05 RW.15 KEL.CIMUNING KEC.MUSITKA JAYA	BEKASI TIMMUR REGENCY BLOK H RT.05 RW.15 KEL.CIMUNING KEC.MUSITKA JAYA, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Lingkungan RT.3 RW.9 Kel.Jatibening Baru Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.3 RW.9 Kel.Jatibening Baru Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	75.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Pemasangan 3 Pcs Convex Mirror Kaca Cermin Cembung Lingkungan RT.2 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Lingkungan RW.06 RT.2 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	3.634.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Lingkungan RT.03 RT.3 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.03 RT.3 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Lingkungan RT.04 RT.4 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.04 RT.4 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Pemasangan 3 Pcs Convex Mirror Kaca Cermin Cembung Lingkungan RW.06 Jl. H.Muhyin, Jl. Cempaka Baru RT.5 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Lingkungan RW.06 Jl. H.Muhyin, Jl. Cempaka Baru RT.5 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	3.634.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Jl. Rawa Indah RT.7 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Jl. Rawa Indah RT.7 RW.6 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Lingkungan RT.6 RW.6 Kel.Jatibening Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.6 RW.6 Kel.Jatibening Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Lingkungan RT.3 RW.1 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.3 RW.1 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penambahan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan RT.03 RW.01 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.03 RW.01 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Lingkungan RT.2 RW.2 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, 10 titik	Lingkungan RT.2 RW.2 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	100.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Jl H Basyar Raya RT.2 RW.3 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Jl H Basyar Raya RT.2 RW.3 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	75.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Jl Wadas Raya RT.4 RW.3 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Jl Wadas Raya RT.4 RW.3 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	75.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Lingkungan RT.6 RW.4 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede,	Lingkungan RT.6 RW.4 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	PJU di lingkungan RT.2 RW.5 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	RT.2 RW.5 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	60.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Pemasangan cermin cembung di lingkungan RT.2 RW.5 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	RT.2 RW.5 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	3.634.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPETITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Lingkungan RT.12 RW.7 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.12 RW.7 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	125.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Jl. Transformator Raya RT.1 RW.7 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede,	Jl. Transformator Raya RT.1 RW.7 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	125.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Lingkungan RT.6 RW.8 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.6 RW.8 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	75.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Lingkungan RT.11 RW.8 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.11 RW.8 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	75.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum RT.6 RW.9 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	RT.6 RW.9 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	75.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum RT.7 RW.9 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede	RT.7 RW.9 Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Lingkungan RT.5 RW.2 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.5 RW.2 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	50.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum di Lingkungan RT.1,2,3,4 RW.2 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, 30 titik	di Lingkungan RT.1,2,3,4 RW.2 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Lingkungan RT.2 RW.5 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.2 RW.5 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Gg. Asmara RT.1 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, 40 titik	Gg. Asmara RT.1 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	50.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum gg. Juwita RT.1 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, 1 titik	gg. Juwita RT.1 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	20.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Jl. Gamprit 3 RT.4 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, 15 titik	Jl. Gamprit 3 RT.4 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Cermin Cembung RT.5 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede,	RT.5 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	3.634.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum di Lingkungan RT.10 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, 22 titik	di Lingkungan RT.10 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Cermin Cembung RT.11 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede,	RT.11 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	3.634.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Cermin Cembung Lingkungan RT.8 RW.15 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede	Lingkungan RT.8 RW.15 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondokgede, Kota Bekasi	3.634.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Lingkungan RT.3 RW.14 Kel.Kranji Kec.Bekasi barat, 5 Titik	Lingkungan RT.3 RW.14 Kel.Kranji Kec.Bekasi barat, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan PJU di kawasan RT.05 RW.12 Kel.Jatisari Kec.Jatiasih , 8 titik	RT.05 RW.12 Kel.Jatisari Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	160.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan sarana PJU RT.10 RW.05 Kel.Jatikramat Kec.Jatiasih , 5 titik	RT.10 RW.05 Kel.Jatikramat Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan sarana PJU RT.04 RW.05 Kel.Jatikramat Kec.Jatiasih , 5 titik	RT.04 RW.05 Kel.Jatikramat Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Sepanjang Pinggir Kali Jl. Rawa Bhakti 3 RT.01 RW.04 Kelurahan Kali Baru Kec. Medan Satria	Jl. Rawa Bhakti 3 RT.01 RW.04 Kelurahan Kali Baru Kec. Medan Satria, Kota	140.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
					Bekasi	
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum Kp. Rawa Pasung RT.04 RW.04 Kelurahan Kali Baru Kec. Medan Satria	Kp. Rawa Pasung RT.04 RW.04 Kelurahan Kali Baru Kec. Medan Satria, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan RT 07 Rw 02 Ke. Harapan Mulya Kec. Medan Satria	RT 07 Rw 02 Ke. Harapan Mulya Kec. Medan Satria, Kota Bekasi	75.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	tidak ada penerangan	Jalan Lingkungan RW 001 Jatirangga, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	tidak ada penerangan	Jalan Lingkungan RT 001/005 Jatisampurna, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan Lampu PJU	Jalan Kimaliun RT 001/003 Kel.Jatikarya , Kota Bekasi	200.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan Lampu PJU dan tiang	Jalan Lingkungan RW 016 Kel.Jatisampurna , Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan Lampu PJU	Jalan Lingkungan RW 010 Kel.Jatiraden , Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pemasangan Lampu PJU	Jalan Lingkungan RW 007 Kel.Jatirangga , Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	kaca cembung	Kecamatan jatisampurna Kota Bekasi , Kota Bekasi	181.700.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Lampu Penerangan Jalan Umum RW.11 Kel. Bekasi Jaya	RW.11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur , Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Lampu Penerangan Jalan Umum RW.12 Kel. Duren Jaya	RW.12 Kel. Duren Jaya Kec.Bekasi Timur , Kota Bekasi	100.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Lampu Penerangan Jalan Umum RW.10 Kel. Bekasi Jaya	RW.10 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Lampu Penerangan Jalan Umum RW.13 Kel. Aren Jaya	RW.13 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Lampu Penerangan Jalan RT.13 RW.16 Kel. Duren Jaya	RT.13 RW.16 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	tidak adanya PJU	Rw 017 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi	150.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	belum adanya spion besar di jalan RT 11 RW 10 Jati Mekar	RT 11 RW 10 Komplek Angkasa Puri Kelurahan Jati Mekar, Kota Bekasi	4.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	belum adanya penerangan jalan yang memadai	Jl. Sirojul munir Rt.01/03 Jati Sari, Kota Bekasi	300.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	belum adanya kaca cembung	Jl Rambutan RT 06 RW 04 Kel Jatimurni, Kec Pondok Melati, Kota Bekasi	25.438.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Belum adanya penerangan yang memadai	JL. MELATI RAYA RW. 06 Kel.Jatiwarna Kec. Pd. Melati , Kota Bekasi	300.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan Umum	RT 04 RW 09 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede (Puspa Yani), Kota Bekasi, Kota Bekasi , Kota Bekasi	150.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Lampu Penerangan Jalan Umum Harapan Baru I RT 07 RW 07 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat	Lampu Penerangan Jalan Umum Harapan Baru I RT 07 RW 07 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi	120.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan PJU di lingkungan RT 02 RW 05 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna	lingkungan RT 02 RW 05 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan PJU di lingkungan RW 02 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna	lingkungan RW 02 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Belum ada penerangan jalan yang memadai	RW.08 Kel. Jatiwarna Kec. Pd. Melati, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan PJU Perum Grand Mutiara RT 003 RW 01 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna	Perum Grand Mutiara RT 003 RW 01 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Belum adanya Kaca cembung	RW.08 Kel. Jatiwarna Kec. Pd. Melati, Kota Bekasi	36.340.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan PJU di lingkungan RT 02 RW 04 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna	Pengadaan PJU di lingkungan Jatisampurna , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan PJU di lingkungan RW 06 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna	lingkungan RW 06 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna , Kota Bekasi	150.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan PJU di lingkungan RW 07 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna	lingkungan RW 07 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Belum adanya penerangan	RT.04 RW.08 Kel. Jatiwarna Kec. Pd. Melati, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Belum adanya penerangan jalan	RT.04 RW.08 Kel. Jatiwarna Kec. Pd. Melati, Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan PJU di lingkungan RW 09 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna	Lingkungan RW 09 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna , Kota Bekasi	100.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan Lampu PJU RW.17 Kel. Aren Jaya	RW.17 Kel. Aren Jaya kec. Bekasi Timur , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Pengadaan Lampu PJU RW.22 Kel. Aren Jaya	RW.22 Kel. Aren Jaya kec. Bekasi Timur , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan 6 Titik RT 01 RW 04 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi	RT 01 RW 04 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi , Kota Bekasi	120.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan RT 01 RW 09 10 Titik Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi	RT 01 RW 09 10 Titik Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi , Kota Bekasi	200.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan RT 02 RW 09 5 Titik Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi	RT 02 RW 09 5 Titik Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan Jalan RT 04,05,dan 09 RW 09 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi	RT 04,05,dan 09 RW 09 10 Titik Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi	200.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPENLITBANGDA	
KABAG HUKUM	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PAGU USULAN
					Bekasi , Kota Bekasi	
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Lampu Penerangan (PJU) Gg H. Tohir RT 04 RW 09 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi	Gg H. Tohir RT 04 RW 09 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi , Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Perbaikan dan Pemasangan Lampu PJU	RT 01 RW 05, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi	100.000.000
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Lampu PJU	Penerangan jalan lingkungan	RT 01 s/d RT 006 RW 011 kelurahan kranji kecamatan bekasi barat, Kota Bekasi	200.000.000
TOTAL						10.644.282.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	



TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategis juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun Tahun 2020-2024.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dikelompokkan menjadi 3 aspek :

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transporatasi ditetapkan 7 sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
- c. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
- d. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*.
- e. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
- f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran :

- a. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda, multimoda, transportasi massal dan TOD (*Transit Oriented Development*)
- b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
- c. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan,terluar, terpecil dan khususnya di wilayah timur Indonesia
- d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
- e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Dalam pencapaian dan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang dikelompokan menjadi 3 aspek tersebut Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

1. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi penindakan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), pembinaan keselamatan lalu lintas serta pengendalian lalu lintas
2. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana transportasi, pengujian prasarana dan bina perparkiran untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
3. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan pembinaan terminal untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya

Selain dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional, dilakukan juga penelaahan terhadap tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2024-2026.

Tujuan Pembangunan Daerah Kota Bekasi terdiri dari 5 (lima) Tujuan yang terdiri dari:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis, inovatif dan akuntabel.
2. Terwujudnya pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan.
3. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang tertib dan aman.
5. Terwujudnya ketahanan struktur perekonomian masyarakat kota

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan melaksanakan tujuan ke 1 (satu) **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis, inovatif dan akuntabel”** dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah”**, dan tujuan ke 3 (tiga) **“Terwujudnya ketersediaan infrastruktur kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan”** dengan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

sasaran **“Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan”**.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai yang diinginkan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Tujuan diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu - isu strategis yang ada.

Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan keselamatan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntable

A. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah :

- **Sasaran untuk tujuan 1 adalah :**
 - 1. Meningkatnya penanganan kemacetan lalu lintas;
 - 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
- **Sasaran untuk tujuan 2 adalah** Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Dinas Perhubungan yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota
Bekasi Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Mewujudkan keselamatan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan			Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	85.8
		Meningkatnya Penanganan kemacetan lalu lintas	1	Persentase peningkatan titik Kemacetan yang tertangani	83%
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	2	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	9,5%
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntable			Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73.12
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	3	Nilai Evaluasi AKIP	78.60

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan, 2024-2026

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

3.3 Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritasisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2024, maka prioritas program dan kegiatan DinasPerhubungan Kota Bekasi diarahkan pada :

- 1. Pelayanan Publik dengan program/kegiatan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana kantor beserta pemeliharannya.
- 2. Peningkatan kelancaran lalu lintas dengan program/kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas, pengadaan fasilitas kelengkapan jalan, bimbuluh (diperuntukkan bagi pengemudi, pemilik angkutan dan siswa sekolah), dan pengendalian fasilitas parkir.
- 3. Peningkatan pelayanan angkutan dengan serangkain program/kegiatan pengembangan dan pemenuhan trayek untuk interkoneksi jaringan angkutan dan penyediaan sarana prasarana penunjang transportasi, Peningkatan keselamatan angkutan jalan dengan program/kegiatan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji .

Rencana Kerja Dinas Perhubungan untuk tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Bekasi

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								194.341.248.324
2	15	1	2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				97.027.487.070				88.665.000.000
						Optimalisasi Disiplin Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%				100%	
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%	
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	100%	73.000.000	PAD		100%	130.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	3 Dokumen	70.000.000	PAD		3 Dokumen	100.000.000
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	9 Laporan	3.000.000	PAD		5 Laporan	30.000.000
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	42.138.354.000	PAD		100%	77.000.689.659
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2634 Orang/bulan	42.135.354.000	PAD		2634 Orang/bulan	76.990.689.659
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	3.000.000	PAD		1 Laporan	30.000.000
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	832.655.000	PAD		100%	1.600.000.000
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	1 Paket	444.455.000	PAD		1 Paket	600.000.000
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	8 Orang	388.200.000	PAD		10 Orang	1.000.000.000
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	1.972.081.000	PAD		100%	2.625.000.000
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	20.000.000	PAD		1 Paket	50.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	225.709.000	PAD		1 Paket	500.000.000
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	100.000.000	PAD		1 Paket	125.000.000
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	1.079.620.000	PAD		1 Paket	1.350.000.000
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	228.000.000	PAD		1 Paket	200.000.000
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	50.000.000	PAD		1 Dokumen	50.000.000
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	113.870.000	PAD		1 Laporan	150.000.000
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	150.000.000	PAD		1 Laporan	150.000.000
2	15	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	4.882.000	PAD		1 Dokumen	50.000.000
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bekasi	100 %	902.350.000	PAD		100 %	950.000.000
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Unit	700.000.000	PAD		1 Unit	700.000.000
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	39 Unit	202.350.000	PAD		50 Unit	250.000.000
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	100 %	49.124.587.920	PAD		100%	4.100.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Laporan	1.306.600.000	PAD		1 Laporan	1.500.000.000
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	47.817.967.920	PAD		12 Laporan	2.600.000.000
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	1.984.459.150	PAD		100%	2.230.000.000
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	9 Unit	180.000.000	PAD		9 Unit	180.000.000
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	156 Unit	1.104.459.150	PAD		156 Unit	1.200.000.000
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	100.000.000	PAD		50 Unit	100.000.000
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	2 Unit	600.000.000	PAD		2 Unit	750.000.000
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				108.445.317.200				105.676.248.324
						Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan		92,50%				93%	
						Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas		13%				14%	
						Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi		85%				90%	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal		75%				80%	
						Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor		70				71	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	Kota Bekasi	100%	93.961.067.760	PAD		100%	93.400.000.000
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Bekasi	2 Unit	200.000.000	PAD		2 Unit	200.000.000
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	4585 Unit	13.842.576.900	PAD		4585 Unit	14.000.000.000
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	8 Unit	200.000.000	PAD		8 Unit	200.000.000
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	45 Unit	79.738.490.860	PAD		50 Unit	79.000.000.000
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	100%	2.793.135.487			100%	5.060.000.000
2	15	2	2.06	16	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	900.000.000	PAD		3 Laporan	1.050.000.000
2	15	2	2.06	8	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	14 Dokumen	756.135.247	PAD		10 Unit	660.000.000
2	15	2	2.06	8	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Kota Bekasi	2 Unit	160.716.800	PAD		2 Unit	170.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	2	2.06	10	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Bekasi	2 Unit	177.787.440	PAD		2 Unit	180.000.000
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	798.496.000	PAD		2 Laporan	3.000.000.000
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	Kota Bekasi	100%	200.000.000	PAD		100%	400.000.000
2	15	2	2.08	7	Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pegemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD		1 Laporan	500.000.000
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal	Kota Bekasi	100%	7.601.500.000	PAD		100%	15.381.908.813
2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	70 Unit	7.401.500.000	PAD		70 Unit	15.181.908.813
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	200.000.000	PAD		2 Laporan	200.000.000
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	Kota Bekasi	100%	750.000.000	PAD		100%	850.000.000
2	15	2	2.03	8	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C`	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual	Kota Bekasi	2 Unit	200.000.000			2 Unit	250.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dan Digital							
2	15	2	2	7		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Bekasi	2 Unit	550.000.000	PAD		2 Unit	600.000.000
2	15	2	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Parkir	Kota Bekasi	100%	993.143.200	PAD		100%	1.150.000.000
2	15	2	2.04	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	793.143.200	PAD		1 Laporan	900.000.000
2	15	2	2.04	1		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD		1 Laporan	250.000.000
2	15	2	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	Kota Bekasi	100%	2.126.470.753	PAD		100%	2.300.000.000
2	15	2	2.05	1		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Bekasi	30 Unit	400.348.753	PAD		30 Unit	500.000.000
2	15	2	2.05	3		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kota Bekasi	1 Unit	726.122.000	PAD		60.000 Unit	800.000.000
2	15	2	2.05	4		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	9 Dokumen	500.000.000	PAD		9 Dokumen	500.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Bekasi	1 Unit	500.000.000	PAD		1 Unit	500.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan telah menyusun rencana strategis dinas yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor perhubungan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan). Dalam ruang lingkup perencanaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi yang bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Bekasi secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

- 4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara continued untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat;
- 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Program dan kegiatan tahun 2025, berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2024-2026 ini pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					205.472.804.270	
2	15	1	2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				97.027.487.070		
						Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%			
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	100%	73.000.000	PAD	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	3 Dokumen	70.000.000	PAD	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	9 Laporan	3.000.000	PAD	
						Optimalisasi Disiplin Aparatur		100%			
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	42.138.354.000	PAD	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2634 Orang/bulan	42.135.354.000	PAD	
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	3.000.000	PAD	
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%			
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	832.655.000	PAD	
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	1 Paket	444.455.000	PAD	
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	8 Orang	388.200.000	PAD	
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%			
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	1.972.081.000	PAD	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	20.000.000	PAD	
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	225.709.000	PAD	
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	100.000.000	PAD	
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	1.079.620.000	PAD	
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	228.000.000	PAD	
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	50.000.000	PAD	
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	1 Laporan	113.870.000	PAD	
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	150.000.000	PAD	
2	15	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	4.882.000	PAD	
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%			
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Bekasi	100 %	902.350.000	PAD	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Unit	700.000.000	PAD	
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	39 Unit	202.350.000	PAD	
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	100 %	49.124.587.920	PAD	
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Laporan	1.306.600.000	PAD	
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	47.817.967.920	PAD	
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	1.984.459.150	PAD	
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	9 Unit	180.000.000	PAD	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	156 Unit	1.104.459.150	PAD	
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	100.000.000	PAD	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	2 Unit	600.000.000	PAD	
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				108.445.317.200		
						Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan		92,50%			
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	Kota Bekasi	100%	93.961.067.760	PAD	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Bekasi	2 Unit	200.000.000	PAD	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	4585 Unit	13.842.576.900	PAD	
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	8 Unit	200.000.000	PAD	
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	45 Unit	79.738.490.860	PAD	
						Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas		13%			
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	100%	2.793.135.487		
2	15	2	2.06	16	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	900.000.000	PAD	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	15	2	2.06	8	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	14 Dokumen	756.135.247	PAD	
2	15	2	2.06	8	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Kota Bekasi	2 Unit	160.716.800	PAD	
2	15	2	2.06	10	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Bekasi	2 Unit	177.787.440	PAD	
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	798.496.000	PAD	
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	Kota Bekasi	100%	200.000.000	PAD	
2	15	2	2.08	7	Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pegemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD	
						Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal		75%			
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal	Kota Bekasi	100%	7.601.500.000	PAD	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	70 Unit	7.401.500.000	PAD	
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	200.000.000	PAD	
						Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi		85%			
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	Kota Bekasi	100%	750.000.000	PAD	
2	15	2	2.03	8	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C`	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Kota Bekasi	2 Unit	200.000.000		
2	15	2	2.03	7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Bekasi	2 Unit	550.000.000	PAD	
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Parkir	Kota Bekasi	100%	993.143.200	PAD	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	793.143.200	PAD	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD	
						Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor		70.000			
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	Kota Bekasi	100%	2.126.470.753	PAD	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Bekasi	30 Unit	400.348.753	PAD	
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kota Bekasi	1 Unit	726.122.000	PAD	
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	9 Dokumen	500.000.000	PAD	
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Bekasi	1 Unit	500.000.000	PAD	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

BAB

5

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2025 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

A. Kesimpulan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

Rencana Kerja tahun anggaran 2025 Dinas Perhubungan ada 2 Program, 14 kegiatan, 43 sub kegiatan dengan pagu Rp 205.472.804.270,- merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi program kerja dan kegiatan serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi kedinasan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

B. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu :

- 1. Sinergi dan koordinasi yang efektif antar Bidang dan Sub Koordinator dalam pelaksanaan Kegiatan dalam Bidang Perhubungan di Kota Bekasi.
- 2. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga mempunyai nilai kebermanfaatan yang tinggi kepada masyarakat pada bidang perhubungan di Kota Bekasi.
- 3. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh perencanaan dan pengendalian yang cermat dan akurat.

Bekasi, 2024
Kepala Dinas Perhubungan



Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si.M,T
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19730211 199203 1 002

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	